

BAB IV

Penutup

4.1 Kesimpulan

Hak atas kebebasan berekspresi warga Indonesia sebenarnya telah dijamin di dalam Pasal 28F UUD RI 1945. Maka perlindungan terhadap hak atas kebebasan berekspresi seharusnya dijalankan sesuai standar kerangka hukum HAM. Pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi harus juga sesuai standar kerangka hukum HAM. Pembatasan ekspresi tidak bisa dirumuskan dan diimplementasikan secara sewenang-wenang. Sesuai Pasal 19 ayat (3) KIHSP yang telah diratifikasi oleh Indonesia di dalam undang-undang, pembatasan kebebasan berekspresi hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum tertulis (legalitas), secara proporsional, dan sepanjang diperlukan (necesitas) untuk: menghormati hak atau nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional, melindungi ketertiban umum, melindungi kesehatan atau moral umum.

Sedangkan pembatasan ekspresi berupa ujaran kebencian merujuk pada Pasal 20 ayat (2) KIHSP yang menyebutkan: segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum. Istilah 'kebencian' atau 'permusuhan' harus diartikan berupa kebencian yang intens dan irasional. Istilah 'hasutan' mengacu pada pernyataan tentang kelompok-kelompok bangsa, ras atau agama yang menimbulkan risiko diskriminasi, permusuhan atau kekerasan terhadap orang-orang yang termasuk dalam kelompok tersebut. Individu atau kelompok menjadi target hasutan diskriminasi karena identitas yang melekat pada dirinya yang tak bisa mereka ubah atau sulit diubah, misalnya seperti kebangsaan, suku, ras, agama, keadaan disabilitas, warna kulit, status pencari suaka, bahasa, jenis kelamin, asal sosial, asal daerah, identitas gender, dan kondisi interseks. Namun pasal-pasal tentang tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia

masih belum diatur secara ketat sesuai standar kerangka hukum HAM. Dalam hal ini Pasal 28 ayat (2) UU ITE menurunkan derajat perbuatan ujaran kebencian dengan merumuskannya sebagai menimbulkan rasa kebencian. Padahal ekspresi baru bisa dibatasi apabila sudah berupa ‘hasutan untuk permusuhan, diskriminasi, atau kekerasan’. Frasa ‘antargolongan’ di dalam pasal tersebut juga tidak diatur secara ketat. Akibatnya, Pasal 28 ayat (2) UU ITE sering digunakan pada ekspresi yang bukan merupakan ujaran kebencian. Termasuk di antaranya yaitu penggunaan dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE alternatif/subsidiar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, meskipun kedua pasal tersebut sangat berbeda. Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dibahas, adapun kesimpulannya yaitu sebagai berikut:

1. Tren dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE berubah setelah revisi UU ITE, termasuk dakwaan dengan alternatif/subsidiar Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga berubah. Terdapat peningkatan signifikan dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE setelah revisi UU ITE. Sebelum revisi UU ITE ditemukan hanya ada 3 putusan dengan dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, sedangkan terdapat 372 putusan dengan dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE setelah revisi UU ITE. Hal ini diduga diakibatkan oleh revisi UU ITE. Terlebih lagi karena tepat setelah revisi UU ITE pada Desember 2016, kasus langsung meningkat sebesar 850% sepanjang 2017. Penggunaan dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE alternatif/subsidiar Pasal 27 ayat (3) UU ITE baru ada setelah revisi UU ITE, yang artinya revisi UU ITE mempengaruhi penggunaan dakwaan tersebut. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah pasal yang paling banyak digunakan oleh penuntut umum sebagai pasal alternatif/subsidiar dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yaitu sebanyak 90 kasus. Pasal kedua yang paling banyak menjadi pasal alternatif/subsidiar adalah Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946, yaitu sebanyak 43 kasus.
2. Sebagian besar ekspresi yang didakwa bukan merupakan ekspresi yang berbasis suku, agama, ras, kebangsaan, atau karakteristik lainnya yang dilindungi. Sebagian

besar ekspresinya bukan merupakan hasutan atau penggerakkan agar orang-orang melakukan kebencian dan permusuhan terhadap kelompok target. Ekspresi-ekspresi yang didakwa misalkan seperti kritik atau penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, penghinaan terhadap individu, seruan demonstrasi, ekspresi yang menyerang pasangan calon Pemilu dan ekspresi yang berkaitan proses jalannya Pemilu namun tidak berbasis suku, agama, ras, dan karakteristik lainnya yang dilindungi. Pola ekspresi yang didakwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE, baik yang dengan atau tanpa alternatif/subsidiar Pasal 27 ayat (3) UU ITE memiliki pola yang mirip. Secara umum, objek yang paling banyak menjadi target ujaran kebencian menurut dakwaan adalah agama Islam, yaitu sebanyak 73 ekspresi. Ekspresi paling banyak kedua yaitu ekspresi yang ditujukan terhadap polisi, yaitu sebanyak 64 kasus. Ekspresi paling banyak ketiga yaitu ditujukan terhadap pemerintah dan presiden sebanyak 47 dan 39 kasus.

3. Dari 375 putusan, hanya 1 putusan dinyatakan bebas dan hanya 1 putusan dinyatakan lepas. Artinya tingkat perbuatannya dinyatakan bersalah (*conviction rate*) adalah sebesar 99,46%. Jumlah terdakwa yang dikenakan penahanan pra-persidangan di dalam rutan sebanyak 365 dari 375 kasus, atau sebesar 97,33%. Pasal yang paling banyak dinyatakan terbukti menurut hakim adalah Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian, yaitu sebanyak 294 kasus.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (“KIHP”)

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor 154 Tahun 2021, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (SKB UU ITE).

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017

Instrumen Internasional

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Komite HAM PBB, General Comment No. 34 “Article 19: Freedom of Opinion and Expression”, CCPR/C/GC/34, 12 September 2011.

Komite Tinggi HAM PBB, *The Rabat Plan Of Action on the Prohibition of Advocacy of National, Racial or Religious Hatred That Constitutes Incitement To*

Discrimination, Hostility or Violence, Lampiran dalam Laporan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, A/HRC/22/17/Add.4, 11 Januari 2013.

Komite HAM PBB, Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including The Right to Development, A/HRC/32/L.20, 27 Juni 2016.

Guterres, Antonio. *The United Nations Strategy and Plan of Action on Hate Speech: Detailed Guidance on Implementation for United Nations Field Presence*. September 2020

International Commission of Jurist, *Siracusa Principles: On The Limitation and Derogation Provisions in The International Covenant on Civil and Political Rights*. Geneva (1983).

Hate Speech Explained – *A Toolkit (2015 Edition)*. London: Free Word Centre, 2015.
Towards an interpretation of article 20 of the ICCPR: Thresholds for the prohibition of incitement to hatred Work in Progress. Vienna: Kantor Komisaris Tinggi HAM, 2010.

Buku

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Dian Rositawati, Jane Aileen Tedjaseputra, Muhammad Tanziel Aziezi, Raynov Tumorang Parmintori, Zainal Abidin, Mentari Anjhanie Ramadhianty, Muhamad Dwieka Fitriani Indrawan. *Melindungi Ekspresi: Analisis Pidana dan HAM Putusan Pengadilan di Indonesia*. Jakarta: LeIP, 2022.

Dirga, Sustira. *Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 28 Ayat (2) tentang Ujaran Kebencian*. Jakarta: ICJR, 2021.

Adhigama A. Budiman, Genoveva Alicia K.S. Maya, Maidina Rahmawati, Zainal Abidin. *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia*. Jakarta: ICJR, 2021.

Basuki, Tobias, Andrew W. Mantong, Alif Satria, Edbert G. Suryahudaya, Richard P. Sianturi. *Unintended Consequences: Dampak Sosial dan Politik UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 2008*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2018.

Brown, Aleander. *Hate Speech Law, A Philosophical Examination*. New York: Routledge, 2015.

Jurnal

Leslie Kendrick, "Speech, Intent, and the Chilling Effect", *William & Mary Law Review*, Vol. 54(5) (2013).

Publikasi

Juniarto, Damar. "8 Poin Catatan Dari Kriminalisasi Netizen Dengan UU ITE Pada Potret Kasus UU ITE 2008-2014", *SAFEnet*. diakses 14 Maret 2023. <https://safenet.or.id/id/2014/11/8-poin-catatan-dari-kriminalisasi-netizen-dengan-uu-ite/>.

A. Ryan Sanjaya, Abul Hasan Banimal, Bimo Fundrika, Ika Ningtyas, Nabilla Saputri, Nenden Sekar Arum, Nike F. Andaru, Supriyono, Unggul Sagena, *Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2020: Represi Digital di Tengah Pandemi*. Bali: SAFEnet, 2021.

“Gara-Gara Kasus Prita, Konsumen Indonesia Jadi Takut Komplain”, *Detikfinance*,
16 April 2013. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2221640/gara-gara-kasus-prita-konsumen-indonesia-jadi-takutkomplain?f9911023=>.

Rilis Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari LBH Pers, SAFENet, ICJR, IJRS, YLBHI, Greenpeace, KontraS, ELSAM, LBH Masyarakat, Imparsial, AJI Indonesia, LBH Jakarta, Puskapa, yang berjudul “Logika Keliru Dalam Rencana Pemerintah Menyusun Pedoman Interpretasi Terhadap UU ITE”,
<https://kontras.org/logika-keliru-dalam-rencana-pemerintah-menyusun-pedoman-interpretasi-terhadap-uu-ite/>.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Kasus UU ITE 2008-2020 Berupa Pasal yang Digunakan (SAFEnet)

SAFEnet

Data Kasus UU ITE 2008-2020
Pasal yang Digunakan

Count of Waktu Pengaduan ke Polisi	Column Labels	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Grand Total
Row Labels														
156 KUHP (termasuk 156a)											1			1
156 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi), Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)											1			1
310-311 KUHP				1				2						3
310-311 KUHP (pencemaran nama), Pasal 27 ayat 1 UU ITE (pornografi), Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)													3	3
310-311 KUHP (pencemaran nama), Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)											2		1	5
310-311 KUHP (pencemaran nama), Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi), lainnya											2	2	1	3
310-311 KUHP (pencemaran nama), Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi), Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)												1		1
310-311 KUHP (pencemaran nama), Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)											8			8
310-311 KUHP (pencemaran nama), Pasal 29 UU ITE (pengancaman)										1				1
310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE							1	1		7				9
310-311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, Lainnya									1					1
310-311 KUHP dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE										1				1
310-311 KUHP dan Pasal 29 UU ITE							1							1
310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)		1							7	6	3			17
310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi), Lainnya										1	1			2
310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi), Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)								1						1
310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi), Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian), 156 KUHP												1		1
310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi), Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian), Lainnya											1			1

310-311 KUHP, Pasal 27 ayat 3 UU ITE, Lainnya									1	3	1			1
Lainnya									1	3				7
Pasal 27 ayat 1 UU ITE												1		1
Pasal 27 ayat 1 UU ITE (pornografi)								1	1					2
Pasal 27 ayat 1 UU ITE (pornografi), Lainnya									2					2
Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi)	1			2	2	11	20	10	38	21	12	7		124
Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi), 310-311 KUHP	1	1	1		2	7	10	4						26
Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi), Lainnya									2		1			3
Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi), Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)									1		3	1	1	5
Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE				1		2	1							4
Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian)									2	16	5	3	3	29
Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian), 156 KUHP									1	2	1			4
Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian), Lainnya									2	1	2	1		6
Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian), Pasal 14-15 UU Nomor 1 Tahun 1946 (keonaran)											1	3		4
Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian), Pasal 14-15 UU Nomor 1 Tahun 1946 (keonaran), Lainnya												1		1
Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian), pasal 156, pasal 156a										2				2
Pasal 28 ayat 2 UU ITE, 156a KUHP					1									1
Pasal 28 ayat 2 UU ITE, Lainnya									1					1
Pasal 29 UU ITE (ancaman)										2				2
Pasal 29 UU ITE (pengancaman)										1	1			2
Pasal 29 UU ITE (pengancaman), Lainnya											1	1		2
Grand Total	3	1	2	3	5	22	36	30	83	54	28	22	289	

Lampiran

II

:

Putusan

Pengadilan

Dengan

Dakwaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE sepanjang 2008-2022.

Nomor Putusan	Provinsi	Terdakwa	Tahun	Pasal lain yang didakwa bersamaan dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE
194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw	Kalimantan Tengah	H. Nuryakin	2013	
477/Pid.B/2016/PN Tjb	Sumatera Utara	Zakaria Siregar	2016	Pasal 156 KUHP
391/Pid.Sus/2016/PN Kla	Lampung	Agung Handoko	2016	Pasal 156a KUHP
278/Pid.B/2017/PN Cjr	Jawa Barat	Sri Rahayu Ningsih	2017	Pasal 16 UU 40/2008; Pasal 156 KUHP
148/Pid.Sus/2017/PN Gst	Sumatera Utara	Rahmatsyah Telaumbanua	2017	Pasal 27 ayat (3) UU ITE; Pasal 29 UU ITE; Pasal 310 KUHP
147/Pid.Sus/2017/PN Gst	Sumatera Utara	Opi Putra Jaya Harefa	2017	
1521/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Pst	DKI Jakarta	Alfian	2017	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
204/Pid.Sus/2017/PN Sgn	Jawa Tengah	Sofyan Wahyudi	2017	Pasal 156a KUHP
1105/Pid.Sus/ 2017/PN Jkt.Utr	DKI Jakarta	Muhammad Faizal Tanong	2017	Pasal 16 UU 40/2008; Pasal 156 KUHP
3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn	Sumatera Utara	Muhammad Farhan Balatif	2017	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
531/Pid.Sus/2017/PN TBT	Sumatera Utara	Dedi Antoni	2017	
197/Pid.Sus/2017/PN.Bls	Riau	Puji Anugrah Laksono	2017	Pasal 207 KUHP; Pasal 208 ayat (1) KUHP
120/Pid.Sus/2017/PN.TIM	Papua Tengah	Demianus Daskunda	2017	Pasal 157 ayat (1) KUHP
121/Pid.Sus/2017/PN Wsb.	Jawa Tengah	Mattofik	2017	Pasal 156 KUHP
230/Pid.B/2017/PN.Bau	Sulawesi Tenggara	Samaruddin	2017	
184/Pid.Sus/2017/PN Yyk	Yogyakarta	Rosyid Nur Rohim	2017	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
164/Pid.Sus/2017/PN Kln.	Jawa Tengah	Rozaq Ismail Sudarmadji	2017	Pasal 156a KUHP
1480/Pid.B/2017/PN.Tjk	Lampung	Deni Putra	2017	Pasal 16 UU 40/2008
896/Pid.Sus/2017/PN Smg	Jawa Tengah	Slamet Wibowo	2017	Pasal 207 KUHP
187/Pid.Sus/2017/PN Kln	Jawa Tengah	Meidi Toto Setiana	2017	Pasal 156a KUHP
354/Pid.Sus/2018/PN Mpw	Kalimantan Barat	Cung Nam Jan	2018	

356/Pid.Sus/2018/PN Mpw	Kalimantan Barat	Jhonny Handoko	2018	
420/Pid.Sus/2018/PN Rap.	Sumatera Utara	Suparman	2018	
7/Pid.Sus/2018/PN Wmn	Papua	Bilmar Lumban Gaol	2018	Pasal 156a KUHP
355/Pid.Sus/2018/PN Sag	Kalimantan Barat	Andi Mustapa	2018	
218/Pid.Sus/2018/PN.Sgi	Aceh	Dahlul Akbar	2018	Pasal 156a KUHP
123/PID.Sus/2018/PN.Tob	Maluku Utara	Muhammad Kacoa	2018	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel	DKI Jakarta	Dhani Ahmad Prasetyo	2018	
110/Pid.Sus/2018/PN Rkb	Banten	Yayi Haidar Aqua	2018	Pasal 16 UU 40/2008
231/Pid.Sus/2018/PN Pgp.	Kepulauan Bangka Belitung	Amirul Mukminin	2018	Pasal 16 UU 40/2008; Pasal 207 KUHP; Pasal 208 ayat (1) KUHP
239/Pid.Sus/2018/PN.Mks	Sulawesi Selatan	Ismail	2018	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
99/Pid.Sus /2018/PN Sdw	Kalimantan Timur	Robbi Darwis	2018	Pasal 156 KUHP
647/Pid.Sus/2018/PN Smn	Yogyakarta	Fikri Alamsyah	2018	
72/Pid Sus/2018/PN Kdl	Jawa Tengah	Taufik	2018	Pasal 187 KUHP
360/Pid.Sus/2018/PN.Jmb	Jambi	Revanaldi Pakpahan	2018	
421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim	DKI Jakarta	Bambang Kiswotomo	2018	
406/Pid.Sus/2018/PN Ktp.	Kalimantan Barat	Isa Anshari	2018	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
180/Pid.Sus/2018/PN.Tjs	Kalimantan Utara	Kholqi Prasetya	2018	
868/Pid.Sus/2018/PN.Ptk	Kalimantan Barat	M. Ilham	2018	
197/Pid.Sus/2018/PN Smn	Yogyakarta	Tara Arsih Wijayani	2018	Pasal 16 UU 40/2008
394/Pid.Sus/2018/PN Pbr	Riau	Syafrianto	2018	Pasal 16 UU 40/2008; Pasal 207 KUHP; Pasal 157 ayat (1) KUHP
492/Pid.Sus/2018/PN Plk	Kalimantan Tengah	Agus Sugianto	2018	Pasal 16 UU 40/2008
258/Pid.Sus/2018/PN Ktp.	Kalimantan Barat	Fitri Septiani	2018	
792/Pid. Sus/2018/PN. Smg	Jawa Tengah	Suprayitno	2018	
138/Pid.Sus/2018/PN Pgp	Kepulauan Bangka Belitung	Rizki Surya Dharma	2018	Pasal 16 UU 40/2008; Pasal 207 KUHP; Pasal 208 ayat (1) KUHP
248/Pid.Sus/2018/PN Bjn	Kalimantan Selatan	Hyde Hideixy Arya Hayden	2018	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
61/Pid.Sus/2018/PN.Ktb	Kalimantan Selatan	H. Sahidudin	2018	Pasal 27 ayat (3) UU ITE

295/Pid. B/2018/PN Smg	Jawa Tengah	Danang Tri Widodo	2018	Pasal 27 ayat (3) UU ITE; Pasal 16 UU 40/2008
282/Pid.B/2018/PN Tar	Kalimantan Utara	Dandi Rahmadila	2018	Pasal 27 ayat (3) UU ITE; Pasal 156 KUHP; Pasal 156a KUHP
151/Pid.Sus/2018/PN Tim	Papua Tengah	Agustinus Yolemal	2018	
242/Pid.Sus/2018/PN Tbh	Riau	Fahrudin	2018	
178/Pid.Sus/2018/PN Kik	Kalimantan Tengah	Agung Setiawan	2018	Pasal 156a KUHP; Pasal 156 KUHP
10/Pid.Sus/2018/PN Bkn	Riau	Hizbullah	2018	Pasal 16 UU 40/2008; Pasal 207 KUHP; Pasal 208 ayat (1) KUHP
635/Pid.Sus/2018/PN Btm	Kepulauan Riau	Roria Agustina Siregar	2018	
2429/Pid.Sus/2018/PN.Mdn	Sumatera Utara	Faisal Abdi Lubis	2018	
294/Pid.Sus/2018/PN Smg	Jawa Tengah	Bambang Hesthi Wahyudi	2018	Pasal 27 ayat (3) UU ITE; Pasal 16 UU 40/2008
301/Pid.Sus/2018/PN Tng		Abraham Ben Moses	2018	Pasal 156a KUHP
77/Pid.Sus/2018/PN Bnr	Jawa Tengah	Ahldin Raharjo	2018	
589/Pid.Sus/2018/PN Btm	Kepulauan Riau	Dendi Januardi	2018	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946; Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946
644/Pid.Sus/2018/PN Bls	Riau	Antoni Banjarnahor	2018	Pasal 156a KUHP
148/Pid.Sus/2018/PN.Tpg	Kepulauan Riau	Mustafa Kamal Nurrullah	2018	Pasal 156a KUHP; Pasal 157 ayat (1) KUHP; Pasal 16 UU 40/2008
1091/Pid.Sus/2018/PN Kis	Sumatera Utara	Saperio Sahputra Perangin Angin Pinem	2018	Pasal 156a KUHP; Pasal 16 UU 40/2008
8/Pid.Sus/2018/PN Trk	Jawa Timur	Febriandi Eko	2018	
139/Pid.Sus/2018/PN Son	Papua Barat Daya	Saiful Bahri Bugis	2018	
379/Pid.Sus/2018/PN Btm	Kepulauan Riau	Omrizal	2018	
1267/Pid.Sus/2018/PN Tjk	Lampung	Romi Erwin Saputra	2018	
12/Pid.Sus/2018/PN Blp	Sulawesi Selatan	Nasrul	2018	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
101/Pid.Sus/2018/PN Bbu	Lampung	Sandi Ferdian	2018	Pasal 16 UU 40/2008
262/Pid.Sus/2018/PN Kla	Lampung	Budi Setiawan	2018	
22/Pid.Sus/2018/PN Trk	Jawa Timur	Endang Sri Erwin	2018	Pasal 27 ayat (3) UU ITE

3617/Pid.Sus/2018/PN Mdn	Sumatera Utara	Agung Kurnia Ritonga	2018	
407/Pid.Sus/2018/PN Btm	Kepulauan Riau	Ronald Pasaribu	2018	
518/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.	DKI Jakarta	Muhamad Luth	2018	Pasal 16 UU 40/2008
1243/Pid.Sus/2018/PN Mks.	Sulawesi Selatan	Maqbul Halim	2018	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
396/Pid.Sus/2018/PN Sim	Sumatera Utara	Amaralsyah Dalimunthe	2018	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946
136/Pid.Sus./2018/PN Rah.	Sulawesi Tenggara	Sukarno	2018	Pasal 156a KUHP
25/Pid.B/2018/PN.Kpg	NTT	Carlos Surya Mahardika Biaf	2018	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
224/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.	Jawa Barat	Ahmad Sihabudin	2018	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
230/Pid.Sus/2018/PN Son	Papua Barat Daya	Carlos	2018	
317/PID.Sus/2018/PN Tng	Banten	Cahyo Gumilar	2018	Pasal 207 KUHP
314/Pid.Sus/2018/PN Stg	Kalimantan Barat	Marmo Utomo	2018	
278 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst	DKI Jakarta	Siti Sundari Dara Nila Utama	2018	Pasal 16 UU 40/2008
506/Pid.Sus/2018/PN PIk	Kalimantan Tengah	Erik Nur Wiyanto	2018	Pasal 16 UU 40/2008; Pasal 27 ayat (4) UU ITE
967/Pid.Sus/2018/PN.Pdg.	Sumatera Barat	Titi Destiani Mendrofa	2018	Pasal 156a KUHP
38/Pid.Sus/2018/PN Bau	Sulawesi Tenggara	Iwan Hasnawi	2018	
378/Pid.Sus/2018/PN Jmb	Jambi	Muhammad Ari Kuoto	2018	
39/Pid.Sus/2018/PN Kib	NTT	Lomboan Djahamou	2018	Pasal 157 ayat (1) KUHP
3230/Pid.Sus/2018/PN.Mdn	Sumatera Utara	Imam Suprpto	2018	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
116/Pid.Sus/2018/PN.Trk.	Jawa Timur	Rahma Dwi Elpida	2018	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
225/Pid.Sus/2018/PN.Cbi.	Jawa Barat	Eneng Sukmawati	2018	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
182/Pid.B/2017/PN Mks.	Sulawesi Selatan	Iwan Alex Efendi	2018	
3/Pid.Sus/2018/PN Bnt	Kalimantan Tengah	Nurul Hakiki	2018	Pasal 156a KUHP
1607/Pid.Sus/2018/PN Mks	Yogyakarta	Darmayanti	2018	
46/Pid.Sus/2018/PN Smd	Jawa Barat	Jam Jam Jamiat	2018	Pasal 160 KUHP; Pasal 170 ayat (1) KUHP
243/Pid.Sus/2018/PN Tbh	Riau	Yan Bona	2018	Pasal 32 ayat (1) UU ITE

1453/Pid.Sus/2018/PN Mks	Sulawesi Selatan	Ansar Amin	2018	
900/Pid.Sus/2018/PN Tjk	Lampung	Suyanto	2018	Pasal 16 UU 40/2008
223/Pid.Sus/2018/PN Kbm	Jawa Tengah	Syaeful Lillah	2018	Pasal 27 ayat (3) UU ITE; Pasal 36 UU ITE
126/Pid.Sus/2018/PN Sdk	Sumatera Utara	Bahagia Sri Manto Maha	2018	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
135/Pid.Sus/2019/PN Pbl	Jawa Timur	Adhy Nurpatia Kartono	2019	
254/Pid.Sus/2019/PN Bit	Jawa Timur	Huda Riyan Nandas	2019	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
96/Pid.Sus/2019/PN Msb	Sulawesi Selatan	Idil	2019	
707/Pid.Sus/2019/PN Ptk	Kalimantan Barat	Fransiskus Samuel	2019	
553/Pid.Sus/2019/PN Blb	Jawa Barat	Syaefudin	2019	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946; Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946; Pasal 207 KUHP; Pasal 208 ayat (1) KUHP
1058/Pid.Sus/2019/PN Mks	Sulawesi Selatan	Samiun Achmad	2019	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946
1536/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Br	DKI Jakarta	Abdul Hakim	2019	Pasal 35 UU ITE; Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946; Pasal 15 UU 1/1946
211/Pid.Sus/2019/PN Mnk	Papua Barat	Septi Meidodga	2019	
63/Pid.Sus/2019/PN Sdw	Kalimantan Timur	H. Fahmi Reza Pahlevi	2019	
130/Pid.Sus/2019/PN Byl	Jawa Tengah	Maryanto	2019	
17/Pid.Sus/2019/PN MAR	Gorontalo	Megawaty H. Maku	2019	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
312/Pid.Sus/2019/PN Son	Papua Barat	Iskandar Alam	2019	
516/Pid.Sus/2019/PN Ptk	Kalimantan Barat	Sopiandi	2019	
587/Pid.Sus/2019/PN Rap	Sumatera Utara	Okto Humala	2019	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946
135/Pid.Sus/2019/PN MII	Sulawesi Selatan	Hendrikus Mangguali	2019	
43/Pid.Sus/2019/PN Skw	Kalimantan Barat	Rudi Hardjana	2019	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
1247/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Br	DKI Jakarta	Iwan Rachmawan	2019	
309/Pid.Sus/2019/PN Plk	Kalimantan Tengah	Hardianur	2019	Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946
113/Pid.Sus/2019/PN Mtk	Kepulauan Bangka Belitung	Daud Rafles Lumban Toruan	2019	Pasal 156a KUHP
201/Pid.Sus/2019/PN Tim	Papua Tengah	Gaudino Pesa Rana Malimongan	2019	Pasal 29 UU ITE

249/Pid.Sus/2019/PN Sdn	Kalimantan Barat	Niken Abadiniati	2019	
109/Pid.Sus/2019/PN Cbn	Jawa Barat	Deni Sofyan Ramdhan	2019	Pasal 156a KUHP
1665/Pid.Sus/2019/PN Mdn	Sumatera Utara	Usep Riyana	2019	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946
1206/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt	DKI Jakarta	Rahmat Rustam	2019	Pasal 27 ayat (4) UU ITE; Pasal 29 UU ITE; Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946; Pasal 15 UU 1/1946; Pasal 207 KUHP; Pasal 208 ayat (1) KUHP
482/Pid.Sus/2019/PN Mlg	Jawa Timur	Faisol Abod Batis	2019	Pasal 16 UU 40/2008; Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946; Pasal 15 UU 1/1946; Pasal 160 KUHP; Pasal 207 KUHP
257/Pid.Sus/2019/PN Tbn	Jawa Timur	Sugeng Priyanto	2019	
126/Pid.Sus/2019/PN Msb	Sulawesi Selatan	Joy Ramadhan	2019	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
1156/Pid.Sus/2019/PN Mks	Sulawesi Selatan	Muhammad Aufar Afdillah Alham	2019	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946
294/Pid.Sus/2019/PN Ktg	Sulawesi Utara	Samsu Laures	2019	
235/Pid.Sus/2019/PN Plk	Kalimantan Tengah	Lugis	2019	Pasal 16 UU 40/2008
293/Pid.Sus/2019/PN Ktg	Sulawesi Utara	Kristian Bima ARjuna Walangaru	2019	
239/Pid.Sus/2019/PN Mtr	NTB	Imran Sasmu	2019	
71/Pid.Sus/2019/PN Slr	Sulawesi Selatan	Akbar Putra	2019	
3478/Pid.Sus/2019/PN Mdn	Sumatera Utara	Dandy Avrianto	2019	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946; Pasal 207 KUHP
98/Pid.Sus/2019/PN Mdn	Sumatera Utara	Zahara AS	2019	Pasal 155 ayat (1) KUHP; Pasal 207 KUHP
154/Pid.Sus/2019/PN Cbn	Jawa Barat	Iwan Adi Sucipto Pattiwael	2019	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946; Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946; Pasal 15 UU 1/1946
50/Pid.Sus/2019/PN Sml	Maluku	Anastasya Bulurdity	2019	Pasal 27 ayat (3) UU ITE; Pasal 27 ayat (4) UU ITE
77/Pid.Sus/2019/PN Bkt	Sumatera Barat	Denny Satriyadi	2019	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
167/Pid.Sus/2019/PN Cms	Jawa Barat	Yudi Haryono	2019	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
859/Pid.Sus/2019/PN Dps	Bali	Haris Kusdi Bastari	2019	Pasal 16 UU 40/2008

20/Pid.Sus/2019/PN Wns	Sulawesi Selatan	Muhammad Yusuf Tonggi	2019	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
265/Pid.Sus/2019/PN Spt	Kalimantan Tengah	Risnawati	2019	Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946
481/Pid.Sus/2019/PN Pal	Sulawesi Tengah	Sugi Nur Raharja	2019	
206/Pid.Sus/2019/PN Tim	Papua Tengah	Wilfred Hendrik Nawipa	2019	
1046/Pid.Sus/2019/PN Mks	Sulawesi Selatan	H. Muh. Sabir	2019	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
3552/Pid.Sus/2019/PN Mdn	Sumatera Utara	Muhammad Hanafi	2019	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946
200/Pid.Sus/2019/PN Tim	Papua Selatan	Thereslin M. Werfete	2019	
218/Pid.Sus/2019/PN Pre	Sulawesi Selatan	Kaharuddin	2019	Pasal 27 ayat (3) UU ITE; Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946
275/Pid.Sus/2019/PN Son	Papua Barat	Leonev W. Taberima	2019	
698/Pid.Sus/2019/PN SDA	Jawa Timur	Arif Kurniawan Radjasa	2019	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946
115/Pid.Sus/2019/PN Tim	Papua Selatan	Pertius Wenda	2019	
412/Pid.Sus/2019/PN Bks	Jawa Barat	Said Djamalul Abidin	2019	Pasal 16 UU 40/2008; Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946
802/Pid.Sus/2019/PN Btm	Jawa Barat	Juanda	2019	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946; Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946
182/Pid.Sus/2019/PN SNG	Jawa Barat	Rudianto	2019	Pasal 156 KUHP
120/Pid.Sus/2019/PN Trt	Sumatera Utara	Serepina Novena Purba	2019	
42/Pid.Sus/2019/PN Trk	Jawa Timur	Widodo	2019	
931/Pid.Sus/2019/PN Mdn	Sumatera Utara	Jocelyn Isabella Tobing	2019	
778/Pid.Sus/2019/PN Kis	Sumatera Utara	Riwelson Sinaga	2019	
1149/Pid.Sus/2019/PN Mks	Sulawesi Selatan	Faizal Lomba	2019	
109/Pid.Sus/2019/PN Tjp	Sumatera Barat	Syahrizal	2019	Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946; Pasal 15 UU 1/1946; Pasal 207 KUHP
316/Pid.Sus/2019/PN Tjk	Lampung	Arip Suparman	2019	
228/Pid.Sus/2019/PN Ktb	Kalimantan Selatan	Muhammad Syahrir	2019	
207/Pid.Sus/2019/PN Ktb	Kalimantan Selatan	Fachrorazi	2019	
1520/Pid.Sus/2019/PN Mks	Sulawesi Selatan	Agus S. T	2019	
345/Pid.Sus/2019/PN Blt	Jawa Timur	Ida Fitri	2019	Pasal 207 KUHP

439/Pid.Sus/2019/PN Mtr	NTB	Guntur Sathiawan Montana	2019	
175/Pid.Sus/2019/PN Plp	Sulawesi Selatan	Eka Trisusanti Toding	2019	
684/Pid.Sus/2019/PN Btm	Kepulauan Riau	Karolin Ervia	2019	Pasal 27 ayat (3) UU ITE; Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946; Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946, Pasal 15 UU 1/1946
76/Pid.Sus/2019/PN Pso	Sulawesi Tengah	Ilham	2019	
1087/Pid.Sus/2019/PN Rap	Sumatera Utara	Hotdiana Gurning	2019	
161/Pid.Sus/2019/PN Bls	Riau	Sumurung Pakpahan	2019	Pasal 156a KUHP
974/Pid.Sus/2019/PN Btm	Kepulauan Riau	Herlangga	2019	Pasal 27 ayat (3) UU ITE; Pasal 207 KUHP
7/Pid.Sus/2019/PN Wng	Jawa Tengah	Martanto	2019	
70/Pid.Sus/2019/PN Ckr	Jawa Barat	Kharis Muhamad Apriawan	2019	Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946; Pasal 15 UU 1/1946
122/Pid.Sus/2019/PN Pal	Sulawesi Tengah	Rahman Syamsu	2019	Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946; Pasal 15 UU 1/1946
53/Pid.Sus/2019/PN Trk	Jawa Timur	Sutrisno	2019	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
3415/Pid.Sus/2019/PN Mdn	Sumatera Utara	Fajar Mursalin	2019	Pasal 28 ayat (1) UU ITE
914/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst	DKI Jakarta	Perdiansyah	2019	Pasal 160 KUHP; Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946; Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946; Pasal 15 UU 1/1946
683/Pid.Sus/2019/PN Btm	Kepulauan Riau	Khalizah	2019	Pasal 27 ayat (3) UU ITE; Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946; Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946; Pasal 15 UU 1/1946
322/Pid.Sus/2019/PN Cbi	Jawa Barat	Bachrudin	2019	Pasal 27 ayat (3) UU ITE; Pasal 157 ayat (1) KUHP; Pasal 16 UU 40/2008
454/Pid.Sus/2019/PN Btm	Kepulauan Riau	Joni Afriadi	2019	Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946; Pasal 15 UU 1/1946
164/Pid.Sus/2019/PN Tdn	Kepulauan Bangka Belitung	Ivan Hartono	2019	
1121/Pid.Sus/2019/PN Tjk	Lampung	Barmawi	2019	

648/Pid.Sus/2019/PN Btm	Kepulauan Riau	A Nurlina B	2019	Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946; Pasal 15 UU 1/1946
77/Pid.Sus/2019/PN Trk	Jawa Timur	Shunu Dwi Widodo	2019	Pasal 27 ayat (3) UU ITE; Pasal 27 ayat (1) UU ITE
3542/Pid.Sus/2019/PN Sby	Jawa Timur	Oscar Anangga Sugiarto	2019	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
834/Pid.Sus/2019/PN Ptk	Kalimantan Barat	Moh. Arif Muslim	2019	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946
1537/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt	DKI Jakarta	Ferryawan Ardiansyah	2019	Pasal 35 UU ITE; Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946; Pasal 15 UU 1/1946
46/Pid.Sus/2019/PN Lsm	Aceh	Safwan	2019	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946; Pasal 35 UU ITE
3151/Pid.Sus/2019/PN Sby	Jawa Timur	Tri Susanti	2019	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946; Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946; Pasal 15 UU 1/1946
259/Pid.Sus/2019/PN Pkl	Jawa Tengah	Teguh Basuki	2019	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
344/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst	DKI Jakarta	Bagus Bawana Putra	2019	Pasal 27 ayat (3) UU ITE; Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946; Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946; Pasal 15 UU 1/1946; Pasal 207 KUHP
84/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst	DKI Jakarta	Augie Fantinus	2019	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
158/Pid.Sus/2019/PN Gin	Bali	Komang Suarta; I Kadek Agus Saputra	2019	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
3149/Pid.Sus/2019/PN Sby	Jawa Timur	Andria Adiansah	2019	Pasal 15 UU 1/1946
222/Pid.Sus/2019/PN Tbn	Jawa Timur	Asrofi	2019	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
310/Pid.Sus/2019/PN SNG	Jawa Barat	Muhamad Amir Muksin	2019	Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946; Pasal 15 UU 1/1946
1/Pid.Sus/2019/PN Mdn	Sumatera Utara	Abdul Hasiholan Siregar	2019	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
565/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst	DKI Jakarta	Mujiman	2019	Pasal 27 ayat (3) UU ITE; Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946; Pasal 15 UU 1/1946; Pasal 207 KUHP

563/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst	DKI Jakarta	Sugiyono	2019	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946; Pasal 27 ayat (3) UU ITE; Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946; Pasal 15 UU 1/1946; Pasal 207 KUHP
564/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst	DKI Jakarta	Suroso	2019	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946; Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946; Pasal 15 UU 1/1946; Pasal 27 ayat (3) UU ITE; Pasal 207 KUHP
90/Pid.Sus/2020/PN Mtw	Kalimantan Tengah	Norhalimah	2020	
278/Pid.Sus/2020/PN Gns	Lampung	Eko Prasetyo	2020	Pasal 208 ayat (1) KUHP; Pasal 207 KUHP
13/Pid.Sus/2020/PN Tbh	Riau	Usman	2020	
341/Pid.Sus/2020/PN Sag	Kalimantan Barat	Sugianto	2020	
38/Pid.Sus/2020/PN Bik	Papua	Randis Lokbere	2020	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946
121/Pid.Sus/2020/PN Tim	Papua Tengah	Soon Tabuni	2020	
866/Pid.Sus/2020/PN Stb	Sumatera Utara	Fery Syahputra	2020	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
325/Pid.Sus/2020/PN Mpw	Kalimantan Barat	Muhammad Suparno	2020	Pasal 156a KUHP
492/Pid.Sus/2020/PN Cbi	Jawa Barat	Meilin Rouli Sitompul	2020	Pasal 156 KUHP
413/Pid.Sus/2020/PN Sgl	Kepulauan Bangka Belitung	Abdul Rais	2020	Pasal 16 UU 40/2008
372/Pid.Sus/2020/PN Sim	Sumatera Utara	Gernal Lundu Nainggolan	2020	Pasal 156a KUHP
154/Pid.Sus/2020/PN Sdw	Kalimantan Timur	Robetnius	2020	
205/Pid.Sus/2020/PN Pbu	Kalimantan Tengah	Muhammad Fathony Enggartyasto Basuki; Risky Setiawan	2020	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
16/Pid.Sus/2020/PN Jap	Papua	Riki Karel Yakarmilena	2020	
46/Pid.Sus/2020/PN Cag	Aceh	Nailan	2020	
1145/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr	DKI Jakarta	Leopratama Limas	2020	Pasal 156a KUHP
324/Pid.Sus/2020/PN Bdg	Jawa Barat	Evi Haryati	2020	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
293/Pid.Sus/2020/PN Rgt	Riau	Mangasa Situmorang	2020	Pasal 157 ayat (1) KUHP
113/Pid.Sus/2020/PN Blt	Jawa Timur	Tutut Galih Prasetyo	2020	Pasal 51 ayat (1) UU ITE
323/Pid.Sus/2020/PN Bdg	Jawa Barat	Aga Faisal	2020	Pasal 27 ayat (3) UU ITE

240/Pid.Sus/2020/PN Cbn	Jawa Barat	Agus Nurrochman	2020	
95/Pid.Sus/2020/PN Sgr	Bali	Gusti Putu Adi Kusuma Jaya	2020	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
211/Pid.Sus/2020/PN Ktb	Kalimantan Selatan	Despianoor Wardani	2020	
42/Pid.Sus/2020/PN Bna	Aceh	Ridwan	2020	
190/Pid.Sus/2020/PN Tpg	Kepulauan Riau	Wira Pratama	2020	Pasal 208 ayat (1) KUHP
155/Pid.Sus/2020/PN Pmk	Jawa Timur	Samsul Arifin	2020	
345/Pid.Sus/2020/PN Tjb	Sumatera Utara	Sulaiman Marpaung	2020	
181/Pid.Sus/2020/PN Stg	Kalimantan Barat	Yeremia Ridho Tuah Damanik	2020	Pasal 156a KUHP
230/Pid.Sus/2020/PN Sak	Riau	Richard Sinaga	2020	Pasal 156a KUHP
40/Pid.Sus/2020/PN Bna	Aceh	Yahdi Ilar Rusydi	2020	Pasal 1 ayat (1) UU 12/1951
66/Pid.Sus/2020/PN Skh	Jawa Tengah	Satna Nopida Tampubolon	2020	Pasal 156 KUHP
407/Pid.Sus/2020/PN Bkn	Riau	Parwoto	2020	Pasal 27 ayat (3) UU ITE; Pasal 27 ayat (4) UU ITE; Pasal 160 KUHP
700/Pid.Sus/2020/PN Pdg	Sumatera Barat	Robby Putra Aryus	2020	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
160/Pid.Sus/2020/PN Rkb	Banten	Darja	2020	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
44/Pid.Sus/2020/PN Tjt		Eperianus	2020	Pasal 156a KUHP
699/Pid.Sus/2020/PN Pdg	Sumatera Barat	Rozi Hendra; Eri Syofiar	2020	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
61/Pid.Sus/2020/PN Lbo	Gorontalo	Mahmud Saleh	2020	Pasal 32 ayat (1) UU ITE
119/Pid.Sus/2020/PN Pnj	Kalimantan Timur	Bayu Pramudiya	2020	
147/Pid.Sus/2020/PN Pbr	Riau	Irdamsyah	2020	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946; Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946
949/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr	DKI Jakarta	Jonerik Munthe	2020	Pasal 156a KUHP
360/Pid.Sus/2020/PN Blt	Jawa Timur	Luqman Sholahudin	2020	Pasal 157 ayat (1) KUHP
172/Pid.Sus/2020/PN Sit	Jawa Timur	Lutfillah Habibi	2020	Pasal 160 KUHP
121/Pid.Sus/2020/PN Plk	Kalimantan Tengah	Mulia Ningsih	2020	Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946
171/Pid.Sus/2020/PN Kbr	Sumatera Barat	Anugrah Boby Pratama	2020	
422/Pid.Sus/2020/PN Bks	Jawa Barat	Herly Gusjati Riyanto	2020	Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946; Pasal 15 UU 1/1946; Pasal 207 KUHP

90/Pid.Sus/2020/PN Gin	Bali	I Wayan Suwena	2020	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
48/Pid.Sus/2020/PN Mnk	Papua Barat	Ishak Samuel Ayer	2020	Pasal 27 ayat (4) UU ITE
173/Pid.Sus/2020/PN Sit	Jawa Timur	Priyo Kurniawan	2020	Pasal 160 KUHP
910/Pid.Sus/2020/PN Bdg	Jawa Barat	Darmawan	2020	Pasal 156a KUHP
690/Pid.Sus/2020/PN Mtr	NTB	Lalu Agus Firad Wirawan	2020	Pasal 156a KUHP
1226/Pid.Sus/2020/PN Mks	Sulawesi Selatan	Bakri Rakka	2020	
100/Pid.Sus/2020/PN Skm	Aceh	Teuku Candra Kirana	2020	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
223/Pid.Sus/2020/PN Tte	Maluku Utara	Anisa Hamid Adam	2020	Pasal 156a KUHP
187/Pid.Sus/2020/PN Mjl	Jawa Barat	Yani Alma Purnama Handayani	2020	
85/Pid.Sus/2020/PN Kgn	Kalimantan Selatan	Khapis Darsi	2020	
247/Pid.Sus/2020/PN Tsm	Jawa Barat	Zulian Nurrahman	2020	
50/Pid.Sus/2020/PN Kmn	Papua Barat	Yosua Rohrohmana	2020	
171/Pid.Sus/2020/PN Kbr	Sumatera Barat	Anugrah Boby Pratama	2020	
437/Pid.Sus/2020/PN Sgl	Kepulauan Bangka Belitung	Rickel	2020	
121/Pid.Sus/2020/PN Bla	Jawa Tengah	Purnomo	2020	
1527/Pid.Sus/2020/PN Sby	Jawa Timur	Karsun	2020	
134/Pid.Sus/2020/PN Pyh	Sumatera Barat	Desmaizar	2020	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
153/Pid.Sus/2020/PN Pbu	Kalimantan Tengah	Muhammad Aliyanto	2020	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
1751/Pid.Sus/2020/PN Sby	Jawa Timur	Lutfi Holi	2020	
182/Pid.Sus/2020/PN Krs	Jawa Timur	Indriyanto	2020	Pasal 156a KUHP
123/Pid.Sus/2020/PN Ktb	Kalimantan Selatan	Diananta Putra Sumedi	2020	
1700/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Br	DKI Jakarta	Rahmat Hidayat	2020	Pasal 156 KUHP
2032/Pid.Sus/2020/PN Mdn	Sumatera Utara	Rahmat Hidayat	2020	Pasal 27 ayat (1) UU ITE; Pasal 156a KUHP
504/Pid.Sus/2020/PN Byw	Jawa Timur	Sumahmo	2020	
80/Pid.Sus/2020/PN Lmj	Jawa Timur	Eko Vindyarto	2020	Pasal 156a KUHP
304/Pid.Sus/2020/PN Pbu	Kalimantan Tengah	Windra Gunawan; Lunas Sampurno Ning Rantao	2020	

886/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim	DKI Jakarta	Imam Sudrajat	2020	Pasal 207 KUHP
142/Pid.Sus/2020/PN Plk	Kalimantan Tengah	Adi Sulaiman	2020	Pasal 16 UU 40/2008
454/Pid.Sus/2020/PN Btm	Kepulauan Riau	Elisabeth Damayanti	2020	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
39/Pid.Sus/2020/PN Skh	Jawa Tengah	Ubin Prasetyo	2020	Pasal 156 KUHP
122/Pid.Sus/2020/PN Srl	Jambi	Ansori Sarwan	2020	
2877/Pid.Sus/2020/PN Sby	Jawa Timur	Fahmy Pamungkas	2020	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
302/Pid.Sus/2020/PN Bgr	Jawa Barat	Leni Marlina	2020	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
128/Pid.Sus/2020/PN Trk	Jawa Timur	Rudy Rofik	2020	Pasal 160 KUHP; Pasal 161 ayat (1) KUHP
282/Pid.Sus/2020/PN Sbw	NTB	Siti Aisyah	2020	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
64/Pid.Sus/2020/PN Tjb	Sumatera Utara	Junjung Baringin Silalahi	2020	Pasal 156a KUHP
391/Pid.Sus/2020/PN BTA	Sumatera Selatan	Debi Reski Putra	2020	Pasal 156a KUHP
334/Pid.Sus/2020/PN Mnd	Sulawesi Utara	Muhamad Ali Lamato	2020	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946; Pasal 28 ayat (1) UU ITE
564/Pid.Sus/2020/PN Kdi	Sulawesi Tenggara	Damsir Efendi	2020	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
247/Pid.Sus/2020/PN Ngw	Jawa Timur	Ali Santoso	2020	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
1227/Pid.Sus/2020/PN Mks	Sulawesi Selatan	Juliardi	2020	
2/Pid.Sus/2020/PN Pso	Sulawesi Tengah	Steven William Rumambi	2020	
94/Pid.Sus/2020/PN Lss	Sulawesi Tenggara	Wais Alkarnais	2020	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946
565/Pid.Sus/2020/PN Bdg	Jawa Barat	Adang Saleh Maulana; Sidik Permana; Rony Ardy	2020	Pasal 160 KUHP
184/Pid.Sus/2020/PN Ktb	Kalimantan Selatan	Syabudin	2020	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946
174/pid.sus/2020/pn mrs	Sulawesi Selatan	Azizyah Usman Malik	2020	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
460/Pid.Sus/2020/PN Mpw	Kalimantan Barat	Giunti Lim	2020	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn	Sumatera Utara	Joniar M. Nainggolan; Benni Eduward	2020	Pasal 27 ayat (3) UU ITE; Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946
160/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst	DKI Jakarta		2020	Pasal 160 KUHP; Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946

159/Pid.Sus/2020/PN Sgr	Bali	I Putu Capri Darmawan	2020	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
336/Pid.Sus/2021/PN Btm	Kepulauan Riau	Uun Nofri Artin Iningsih	2021	
256/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr	DKI Jakarta	Inayatulloh	2021	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
564/Pid.Sus/2021/PN Smg	Jawa Tengah	R. Winindya Satriya	2021	
30/Pid.Sus/2021/PN Mrn	Aceh	Riki Akbar	2021	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
57/Pid.Sus/2021/PN Pnn	Sumatera Barat	Khairil	2021	
628/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL	DKI Jakarta	Mahendra Lazuardi	2021	
236/Pid.Sus/2021/PN Bna	Aceh	M Jafar	2021	Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946; Pasal 15 UU 1/1946
255/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr	DKI Jakarta	Sudiyono	2021	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
248/Pid.Sus/2021/PN Bna	Aceh	Wahidin	2021	Pasal 160 KUHP
68/Pid.Sus/2021/PN Bna	Aceh	Abu Bakar	2021	
71/Pid.Sus/2021/PN RBI	NTB	Haerul	2021	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
76/Pid.Sus/2021/PN Mtr	NTB	Sofyandi	2021	
228/Pid.Sus/2021/PN Mnd	Sulawesi Utara	Octavianus Mandulr	2021	Pasal 66 UU 24/2009
71/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr	DKI Jakarta	Muhammad Faizal	2021	Pasal 207 KUHP
305/Pid.Sus/2021/PN Tpg	Kepulauan Riau	Mustafa Kamal Nurullah	2021	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946; Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946
102/Pid.Sus/2021/PN Tjs	Kalimantan Utara	Paul Mauregar Lalong	2021	
151/Pid.Sus/2021/PN Mdn	Sumatera Utara	Wahyu Rasasi Putri	2021	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946; Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946; Pasal 160 KUHP
123/Pid.Sus/2021/PN Ktg	Sulawesi Utara	Muhammad Amri	2021	
268/Pid.Sus/2021/PN Pbu	Kalimantan Tengah	Rifaldi Afghan	2021	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
88/Pid.Sus/2021/PN Bil	Jawa Timur	Mochammad Sirojudin	2021	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946
248/Pid.Sus/2021/PN Lwk	Sulawesi Tengah	Wandi Ladupu	2021	
90/Pid.Sus/2021/PN Bil	Jawa Timur	Abd. Hakam	2021	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946
91/Pid.Sus/2021/PN Bil	Jawa Timur	Samsul Hadi	2021	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946
89/Pid.Sus/2021/PN Bil	Jawa Timur	Muchammad Nawawi	2021	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946
98/Pid.Sus/2021/PN Pgp	Kepulauan Bangka	Ferza Arika	2021	Pasal 27 ayat (3) UU ITE

	Belitung			
165/Pid.Sus/2021/PN Prp	Riau	Chay Marbun	2021	
15/Pid.Sus/2021/PN Slw	Jawa Tengah	Johanes Agung Kurniawan	2021	
426/Pid.Sus/2021/PN Kdi	Sulawesi Tenggara	Muhammad Jisrah Rahman	2021	Pasal 207 KUHP
31/Pid.Sus/2021/PN Stg	Kalimantan Barat	Ferdinandus Gunalan	2021	
71/Pid.Sus/2021/PN Skw	Kalimantan Barat	Andreas Kenny Kumala	2021	Pasal 156a KUHP
62/Pid.Sus/2021/PN Mpw	Kalimantan Barat	Syaifullah	2021	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
12/Pid.Sus/2021/PN Rno	NTT	Muchtar Hasan Rivay	2021	
59/Pid.Sus/2021/PN Tim	Papua Tengah	Salmon Yowei	2021	
21/Pid.Sus/2021/PN MII	Sulawesi Selatan	Markus Tandil	2021	
160/Pid.Sus/2021/PN Tka	Sulawesi Selatan	Helmi Irawan	2021	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
8/Pid.Sus/2021/PN Msh	Maluku	Ali Tuahan	2021	
196/Pid.Sus/2021/PN Tpg	Kepulauan Riau	Ignatius Toka	2021	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
127/Pid.Sus/2021/PN Bks	Jawa Barat	Dedy Wahyudi	2021	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946; Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946; Pasal 207 KUHP; Pasal 15 UU 1/1946
52/Pid.Sus/2021/PN Dgl	Sulawesi Tengah	Moh. Irsyad	2021	
1845/Pid.Sus/2021/PN Mdn	Sumatera Utara	Muh. Imam Kurniawan	2021	
40/Pid.Sus/2021/PN Trt	Sumatera Utara	Samuel Enrico	2021	Pasal 156 KUHP
23/Pid.Sus/2021/PN Mkd	Jawa Tengah	Fajar Haryono	2021	Pasal 27 ayat (4) UU ITE
204/Pid.Sus/2021/PN Bna	Aceh	Heri Syahputra	2021	
14/Pid.Sus/2021/PN Enr	Sulawesi Selatan	Ridwan	2021	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
177/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt	DKI Jakarta	Duta Boas	2021	Pasal 27 ayat (4) UU ITE; Pasal 207 KUHP
108/Pid.Sus/2021/PN Spg	Jawa Timur	Turmudi	2021	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946
511/Pid.Sus/2021/PN Pal	Sulawesi Tengah	Muhammad Nasrul	2021	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
92/Pid.Sus/2021/PN Clp	Jawa Tengah	Muridan	2021	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
2029/Pid.Sus/2021/PN Sby	Jawa Timur	Herman	2021	

1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL	DKI Jakarta	Muhammad Yahya Waloni	2021	Pasal 156a KUHP; Pasal 156 KUHP
153/Pid.Sus/2021/PN Mdn	Sumatera Utara	Khairi Amri	2021	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946; Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946; Pasal 160 KUHP
58/Pid.Sus/2021/PN Sdr	Sulawesi Selatan	Asnanni	2021	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
104/Pid.Sus/2021/PN Ttn	Aceh	Mulia	2021	Pasal 207 KUHP; Pasal 66 UU 24/2009
123/Pid.Sus/2021/PN Mjl	Jawa Barat	Fuad Azhari; Anggi Nuryahdin	2021	
102/Pid.Sus/2021/PN Pyh	Sumatera Barat	Yulidarnis	2021	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
103/Pid.Sus/2021/PN Tbh	Riau	Slamet Wardoyo	2021	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
112/Pid.Sus/2021/PN Pgp	Kepulauan Bangka Belitung	Sukma Wijaya	2021	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946; Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946; Pasal 15 UU 1/1946; Pasal 27 ayat (3) UU ITE; Pasal 310 ayat (2) KUHP; Pasal 311 ayat (1) KUHP; Pasal 207 KUHP
117/Pid.Sus/2021/PN Sit	Jawa Timur	Ibreh Baim	2021	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
46/Pid.Sus/2021/PN Plp	Sulawesi Selatan	Muhammad Asrul	2021	Pasal 27 ayat (3) UU ITE; Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946
28/Pid.Sus/2022/PN Sdn	Kalimantan Barat	Raswin	2022	Pasal 29 UU ITE; Pasal 35 UU ITE
72/Pid.Sus/2022/PN Ttn	Aceh	Baliya	2022	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
1484/Pid.Sus/2022/PN Sby	Jawa Timur	Muhammad Budiyono	2022	Pasal 156 KUHP
242/Pid.Sus/2022/PN Byw	Jawa Timur	Jatmiko	2022	
267/Pid.Sus/2022/PN Mnd	Sulawesi Utara	Indra Matheos	2022	
46/Pid.Sus/2022/PN Bms	Jawa Tengah	Priyanto Edi Santoso	2022	Pasal 160 KUHP
214/Pid.Sus/2022/PN Jmr	Jawa Timur	Nafiul Faizun	2022	
256/Pid.Sus/2022/PN Mtr	NTB	Sri Sudarjo	2022	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946; Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946; Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946
40/Pid.Sus/2022/PN Tim	Papua Tengah	Indah Jelita Rumambi Umboh	2022	
218/Pid.Sus/2022/PN Tjk	Lampung	Hadi Saputra	2022	
835/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL	DKI Jakarta	Ervin Julio Darmali	2022	Pasal 156a KUHP

175/Pid.Sus/2022/PN Gdt	Lampung	Zaidan	2022	Pasal 335 ayat (1) KUHP; Pasal 27 ayat (4) UU ITE; Pasal 18 ayat (1) UU 40/1999
36/Pid.Sus/2022/PN Tjg	Kalimantan Selatan	Erwin Putra Pratama	2022	Pasal 35 UU ITE
834/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL	DKI Jakarta	Niken Dian Pratiwi	2022	Pasal 156a KUHP
521/Pid.Sus/2022/PN Srg	Banten	Rohmatulloh	2022	Pasal 157 ayat (1) KUHP
836/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL	DKI Jakarta	Dio Abby Dharma; Amadea Ayu Budiharti	2022	Pasal 156a KUHP
74/Pid.Sus/2022/PN Gdt	Lampung	Abdul Manaf	2022	Pasal 27 ayat (4) UU ITE; Pasal 18 ayat (1) UU 40/1999
43/Pid.Sus/2022/PN Lmj	Jawa Timur	Hadfana Firdaus	2022	Pasal 156 KUHP; Pasal 156a KUHP
219/Pid.Sus/2022/PN Amb	Maluku	Maryo Malawau	2022	Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946; Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946; Pasal 15 UU 1/1946
45/Pid.Sus/2022/PN Tim	Papua Tengah	Margaretha Marweri	2022	
890/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt	DKI Jakarta	Roy Suryo	2022	Pasal 156a KUHP; Pasal 15 UU 1/1946